

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Pengangguran

Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1729–1790) menyatakan bahwa pengangguran dapat dihindari melalui mekanisme pasar bebas yang menyesuaikan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam pandangan klasik, pengangguran dianggap sebagai fenomena sementara akibat ketidakseimbangan sementara di pasar tenaga kerja. Ketika terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja, maka penurunan upah akan mendorong permintaan tenaga kerja meningkat kembali hingga tercapai keseimbangan. Oleh karena itu, dalam kerangka teori klasik, pengangguran dapat diatasi melalui fleksibilitas harga dan upah. Dalam teori klasik, kelebihan pasokan tenaga kerja menyebabkan rendahnya upah dan penurunan output perusahaan. Oleh karenanya jika perusahaan kelebihan tenaga kerja pada fenomena saat ini yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengurangi nilai upah atau bisa juga dengan mengurangi tenaga kerja, dalam hal ini bisa saja masyarakat kehilangan pekerjaannya dikarenakan hal tersebut, jika masyarakat kehilangan pekerjaan maka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak akan terpenuhi, jadi pada hal ini masyarakat akan kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan kembali dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah banyak (Malik, 2022).

Berbeda dengan pandangan klasik, teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 berpendapat bahwa pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes, pasar tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga tingkat permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Dalam kondisi upah rendah, daya beli masyarakat menurun sehingga konsumsi juga menurun, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi pengangguran. Oleh karena itu, Keynes menyarankan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas permintaan melalui kebijakan fiskal dan moneter (Badria, 2022).

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang yang

termasuk dalam angkatan kerja bersedia dan mampu bekerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Sukirno (2006) menyatakan bahwa pengangguran terjadi ketika seseorang tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun sedang aktif mencarinya. Simanjuntak menambahkan bahwa pengangguran juga mencakup mereka yang bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu. Tingginya angka pengangguran mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar, yang menunjukkan bahwa mekanisme pasar tenaga kerja tidak berjalan secara optimal (Widiyati, 2016).

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran antara lain adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia, dan preferensi individu untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih layak. Dampak dari pengangguran tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena penurunan daya beli dan rendahnya produktivitas masyarakat.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur total nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Menurut Jannah (2020), PDRB menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan menjadi acuan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi regional. PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Jannah, 2020).

PDRB mengukur barang dan jasa akhir diproduksi di suatu wilayah. PDRB dibagi menjadi 2 jenis: PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) digunakan dalam penelitian ini karena dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami ekspansi, yang secara teoritis dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, penurunan PDRB dapat menunjukkan kontraksi ekonomi yang dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja (Isbah & Yani, 2016).

PDRB dihitung dengan 3 cara, yakni: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB juga menjelaskan bagaimana sumber daya alam dikelola pada daerah tertentu, karena tinggi rendahnya nilai PDRB juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan SDA, serta banyaknya pengangguran juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan investasi yang dilakukan oleh investor domestik untuk memperkuat kapasitas produksi di dalam negeri. Menurut Fatimah (2007), investasi adalah pengeluaran untuk pembelian barang modal yang bertujuan meningkatkan produksi barang dan jasa di masa depan (Fatimah, 2007). PMDN berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena secara langsung menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja dan memperluas kapasitas industri (Suindyah, 2009) dalam (Suhendro & Siregar, 2019).

Dewi, dkk (2021) menyatakan bahwa PMDN tidak hanya meningkatkan output tetapi juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan masuknya investasi domestik, perusahaan dapat melakukan ekspansi dan pembangunan infrastruktur, yang secara langsung mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Upah Minimum

Upah Minimum Provinsi merupakan standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), upah minimum mencakup tidak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan tetap yang diterima secara reguler. Upah menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Gilarso (2003) membedakan antara upah nominal, yaitu jumlah uang yang diterima, dan upah riil, yaitu daya beli dari upah tersebut. Meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dalam konteks ekonomi mikro, hal ini dapat berdampak negatif terhadap pengangguran apabila kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional (Wardiansyah, Yulmardi, & Bahri, 2017).

5. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga yang sering terjadi selama periode tertentu. Dalam perekonomian, inflasi sering terjadi 2- 4% per tahun, yang diklasifikasikan sebagai inflasi dengan inflasi merayap. Inflasi yang terjadi lebih serius seringkali lebih parah dan berkisar antara 5 hingga 10 persen per tahun. Dalam keadaan tertentu, inflasi dapat mencapai ratusan persen atau bahkan ribuan persen per tahun sebagai akibat dari resesi atau adanya pengaruh lain, dan inflasi ini dikenal dengan hiper inflasi (Daniel, 2018).

Menurut Parakassi (2017), inflasi dapat disebabkan oleh tekanan permintaan (*demand-pull inflation*) maupun tekanan biaya produksi (*cost-push inflation*). Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan margin keuntungan pelaku usaha, sehingga berdampak terhadap penurunan produksi dan pengurangan tenaga kerja (Parakassi, 2017).

Menurut teori Phillips Curve, terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Ketika inflasi meningkat karena tingginya permintaan agregat, pengangguran cenderung menurun. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini dapat bersifat tidak stabil tergantung pada ekspektasi inflasi dan respons kebijakan moneter. Oleh karena itu, pengaruh inflasi terhadap pengangguran perlu dianalisis secara kontekstual berdasarkan kondisi ekonomi suatu negara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yang menjadi dasar dalam pengembangan kajian dan pembentukan hipotesis. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Muhammad Nurcholis (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur tahun 2008–2014”, menemukan bahwa seluruh variabel dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memainkan peran penting dalam mengendalikan angka pengangguran.

Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagyo (2014) melalui penelitian berjudul “Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Pengangguran”, menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sementara jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan. Di sisi lain, inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Studi ini dilakukan pada wilayah Eks-Karesidenan Surakarta.

Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umairah Masjukri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2014”, menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum belum tentu efektif dalam menurunkan pengangguran di wilayah tersebut.

Nadia Ika Purnama dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Medan Tahun 2000–2014”, menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPT Kota Medan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan pengangguran di kota tersebut.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia", variabel yang digunakan termasuk PDRB, PMDN, Upah minimum, dan inflasi. Ini dapat dijelaskan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

